

## Pengintegrasian Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

**Aisyah Dewi\***, **M. Arieliyanto\*\***, **Muhamma Asif Nur Fauzi\*\*\***

\*Program Studi Teknik Logistik, Fakultas Rekayasa Industri, Surabaya, Indonesia  
[aisyahdewi@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:aisyahdewi@student.telkomuniversity.ac.id)

\*\* Program Studi Teknik Logistik, Fakultas Rekayasa Industri, Surabaya, Indonesia  
[muhammadariel@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:muhammadariel@student.telkomuniversity.ac.id)  
\*\*\* Stebi Syaikhona Kholil Sidogiri  
[asif.elek24@gmail.com](mailto:asif.elek24@gmail.com)

\*Corresponding author, email: [aisyahdewi@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:aisyahdewi@student.telkomuniversity.ac.id)



©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Accepted: 22 April 2024	Revised : 22 June 2024	Published: 30 June 2024
-------------------------	------------------------	-------------------------

### ABSTRACT

*Gender equality is the main focus in Indonesia's sustainable development agenda, especially in achieving the SDGs targets in 2030 and Golden Indonesia 2045. This development program emphasizes the importance of considering gender differences in formulating development policies and programs. In implementing gender sensitivity and response, gender needs analysis is an important stage in ensuring policies and programs are inclusive and responsive to community needs. The Gender Responsive Planning and Budgeting Program (PPRG) is the main instrument in integrating gender perspectives into development, with the aim of ensuring sustainable development that is fair and non-discriminatory for all individuals, regardless of gender. The research results show that integrating gender perspectives in policies and programs can increase development effectiveness, reduce gender inequality, and create a more inclusive and just social environment. By considering differences and needs between genders, including in the Gender-Based Development and Needs Analysis Program, Indonesia can ensure that every individual has equal and fair opportunities in various aspects of life. Integrating gender perspectives is not only a step towards achieving gender equality, but also a prerequisite for inclusive and sustainable development in the future. Through efforts like PPRG, Indonesia can ensure that development policies and programs reflect the needs and aspirations of all societal groups, thereby creating a more just, balanced and developed society as a whole.*

**Keywords:** Gender; Gender equality; Indonesia's Golden Era 2045; Integration.

## ABSTRAK

*Kesetaraan gender merupakan fokus utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia, terutama dalam mencapai target SDGs tahun 2030 dan Indonesia Emas 2045. Program pembangunan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan gender dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Dalam penerapan sensitivitas dan respon gender, analisis kebutuhan gender menjadi tahap penting dalam memastikan kebijakan dan program yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) menjadi instrumen utama dalam integrasi perspektif gender ke dalam pembangunan, dengan tujuan memastikan keberlanjutan pembangunan yang adil dan tidak diskriminatif bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan program dapat meningkatkan efektivitas pembangunan, mengurangi ketimpangan gender, dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan adil. Dengan mempertimbangkan perbedaan dan kebutuhan antar gender, termasuk dalam Program Pembangunan dan Analisis Kebutuhan Berbasis Gender, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil dalam berbagai aspek kehidupan. Integrasi perspektif gender bukan hanya merupakan langkah untuk mencapai kesetaraan gender, tetapi juga merupakan prasyarat untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Melalui upaya seperti PPRG, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari semua kelompok masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan berkembang secara menyeluruh.*

**Keywords:** Gender; Indonesia Emas 2045; Integrasi; Kesetaraan Gender.

## 1. PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan salah satu topik hangat di Indonesia hingga saat ini dikarenakan topik ini berkaitan dengan agenda SDGs poin kelima serta pembangunan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan hak ekonomi antara laki-laki dan perempuan di tahun 2030. Pada tingkat nasional, Indonesia telah berpartisipasi dalam inisiatif gender negara-negara G7, serta mengakui banyak konvensi global dan mendukung deklarasi internasional yang mendorong kesetaraan dan keadilan gender (Firman et al. 2023). Partisipasi tersebut sehubungan dengan penerapan sensitivitas dan respon gender dalam mencapai tujuan dalam kesetaraan gender. Tujuan dari penerapan sensitivitas dan respon gender adalah untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Ini adalah prosedur yang diperlukan untuk mengurangi diskriminasi gender dan menciptakan norma-norma gender (Ramdhaningrum et al. 2022).

Dalam penerapan sensitivitas dan respon gender, diperlukan tahap analisis kebutuhan gender secara keseluruhan (Amsar 2023). Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, menyatakan bahwa analisis gender harus dilakukan sesuai dengan ayat 4 undang-undang yang berisi tentang pengumpulan, pengelolaan, dan penyusunan data terpilah gender. Selain itu, analisis gender dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis kerja *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis

*Pengintegrasian Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)*  
Aisyah Dewi, M. Arieliyanto, dan Muhammad Asif Nur Fauzi

lainnya. Analisis gender terkait anggaran dan rencana kerja SKPD dapat dilakukan oleh masing-masing SKPD secara individual dan analisis gender terkait RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD, serta Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat berkolaborasi dengan lembaga tinggi atau organisasi lain yang mempunyai keahlian yang diperlukan untuk melakukan analisis tersebut.

Pada 24 November 2023, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan kembali dua program pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kesetaraan gender. Pemaparan ini disampaikan pada Seminar Pendidikan Gender bertema “APBN Responsif Gender Menuju Indonesia Emas 2045” yang dilaksanakan di Aula Mezzanine Kompleks Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Indonesia. Proses integrasi perspektif gender dengan Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai bagian dari *Gender Development and Needs Partnership* di Indonesia merupakan proses yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran. Penerapan PPRG terbentuk dengan sistem dan kombinasi pengawasan tahunan pemerintah daerah (Pengawasan Reguler) dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat (PKPT) (Arieta et al. 2022). Hal ini merupakan langkah yang diperlukan untuk memahami perbedaan atau kesenjangan akses dan kemampuan di beberapa bidang kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi.

Penerapan PPRG dilakukan dengan menonjolkan perbedaan laki-laki dan perempuan, dengan membatasi pelaksanaan dan penilaian PPRG di Kementerian PU serta dengan menerapkan kebijakan PPRG di Kementerian PU. Program PPRG juga dapat digunakan sebagai alat kerja atau alat analisis untuk membantu menentukan keberhasilan suatu proyek bangunan. Hal ini disebabkan karena PPRG merupakan *stress test* atau alat analisis terkait pekerjaan yang digunakan dalam proses pelaksanaan rencana dan kebijakan pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam proses kebijakan pembangunan dan program pembangunan daerah, PPRG dapat secara efektif mengawasi kemajuan proyek pembangunan.

## **2. LITERATURE REVIEW**

### **2.1. Pengintegrasian Perspektif Gender**

Penelitian menunjukkan bahwa memasukkan perspektif gender ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan gender dalam akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan sumber daya keuangan (Vininda and Yuliana 2021). Mereka menyadari bahwa inisiatif ini tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian juga menyatakan bahwa mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pengambilan keputusan dan penyampaian cerita dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sehari-hari dan mengurangi dukungan sosial (Pradnya 2020). Mereka memahami bahwa jika gender dipertimbangkan dalam setiap tahap konstruksi, maka hasilnya akan lebih seimbang dan perseptif, sehingga menghasilkan masyarakat yang lebih dewasa dan kohesif (Afdhal 2023).

### **2.2 Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**

*Pengintegrasian Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)*  
Aisyah Dewi, M. Arieliyanto, dan Muhammad Asif Nur Fauzi

Pentingnya pendekatan dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mencerminkan kebutuhan dan kontribusi baik laki-laki maupun perempuan, seperti Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Menurut penelitian, penerapan PPRG berhasil meningkatkan akses pegawai terhadap layanan kesehatan reproduksi di beberapa wilayah Indonesia (Agustina, Mursyidah, and Sukmana 2021). Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa evaluasi PPRG sangat penting dalam menjamin keberhasilan dan keberlangsungan program yang bersangkutan (Ilmu et al. 2021).

### **2.3 Program Indonesia Emas Tahun 2045**

Pada tahun 2045, Laut Jawa Timur bercita-cita menjadi negara maju dengan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik yang tinggi. Indonesia Emas bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sekitar 6-7% setiap tahun (Puspa, Rahayu, and Parhan 2023). Selain itu, sesuai laporan Bank Dunia tahun 2022, tujuan penelitian ini adalah untuk menurunkan tingkat pertumbuhan hingga di bawah 5% dan menurunkan tingkat pengembalian investasi dengan menargetkan rasio pertumbuhan kurang dari 0,35 pada tahun 2045 (Aisyah, Dahlan, and Aprilia 2023).

Penelitian menyoroti pentingnya kemajuan Indonesia dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi, dengan tujuan meningkatkan persentase siswa guru tinggi yang lulus sebesar 60% pada tahun 2045 (Fauzia Dwi Sasmita et al. 2023). Infrastruktur berkualitas tinggi juga disorot dengan tujuan mencapai 7-8% PDB (produk domestik bruto) investasi infrastruktur pada tahun 2045 (Maximus Gorky Sembiring 2022). Oleh karena itu, Indonesia Emas pada tahun 2045 tidak hanya akan menjadi model nasional, tetapi juga komitmen nasional untuk mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa bidang kehidupan sehari-hari.

### **2.4. Kebutuhan Antar Gender**

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam "Gender & Development" pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan antar gender dapat membantu menciptakan program dan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif (Alif Hudzaifah Fahri, Junaeda, and Nur 2023). Data yang dikumpulkan dari survei nasional menunjukkan bahwa perempuan sering kali memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesempatan ekonomi dibandingkan dengan laki-laki (Hakiki et al. 2020). Lebih lanjut, analisis gender yang mendalam dalam jurnal "Gender, Place & Culture" pada tahun 2022 oleh Johnson dan Brown menyoroti bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya memengaruhi kebutuhan antar gender di berbagai konteks geografis (Ramadhani and Hubeis 2020). Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan inklusif.

Selain itu, literatur terbaru juga menyoroti peran penting kebutuhan antar gender dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Integrasi perspektif gender ke dalam program pembangunan memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian SDGs (Milasari 2024). Data yang dianalisis dari berbagai proyek pembangunan menunjukkan bahwa mempertimbangkan kebutuhan antar gender dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program pembangunan, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya memasukkan suara perempuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi dari semua kelompok masyarakat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif atau deskriptif. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti, yang dianggap sebagai instrumen manusia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat memfokuskan temuan dan analisisnya dengan mencari informasi teoritis dari total 28 sumber seperti buku, jurnal, artikel, tesis, atau media lain yang dapat digunakan untuk membuat artikel tentang pengintegrasian Perspektif Gender dengan Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai Program Pembangunan dan Kebutuhan Antar Gender di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan data yang dikumpulkan, dilakukan analisis dan prediksi hasilnya.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Pengintegrasian Perspektif Gender**

Pengintegrasian perspektif gender adalah pendekatan yang mendasarkan pada kesadaran akan peran gender dalam analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, program, atau proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pandangan gender tercermin dalam semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pengintegrasian perspektif gender menjadi semakin penting dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan sosial dan ekonomi. Menurut World Bank (2023), penelitian menunjukkan bahwa integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan program dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan, serta mengurangi ketimpangan gender. Sebagai contoh, sebuah studi oleh UN Women (2022) menyoroti bahwa pengintegrasian perspektif gender dalam program pendidikan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan di berbagai negara. Dengan menerapkan pendekatan ini, lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam mengakses pendidikan, seperti kekerasan gender dan peran gender dalam tanggung jawab rumah tangga.

Selain itu, pengintegrasian perspektif gender juga berdampak positif dalam sektor ekonomi. Kesetaraan gender di tempat kerja dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Afni, Rezal, and Latoki 2022). Lebih lanjut, sebuah laporan oleh McKinsey Global Institute (2020) menunjukkan bahwa mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi tenaga kerja dapat meningkatkan PDB global

*Pengintegrasian Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)*  
Aisyah Dewi, M. Arieliyanto, dan Muhammad Asif Nur Fauzi

secara signifikan. Dengan memperhitungkan perspektif gender dalam kebijakan ketenagakerjaan, seperti kebijakan cuti parental dan dukungan untuk perawatan anak, negara-negara dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan merata bagi semua individu, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Integrasi perspektif gender memerlukan serangkaian langkah yang menyeluruh. Pertama, analisis gender dilakukan untuk memahami perbedaan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan antara pria dan wanita. Selanjutnya, perencanaan kebijakan harus didasarkan pada pemahaman dampaknya terhadap kedua jenis kelamin, dengan menyusun indikator kinerja spesifik. Saat menjalankan kebijakan, penting untuk memperhatikan dan merespons kebutuhan khusus pria dan wanita, termasuk dalam penyediaan layanan yang sesuai. Selain itu, penting juga untuk memberikan kesempatan partisipasi yang sama bagi kedua jenis kelamin dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Evaluasi yang mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kedua jenis kelamin perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan mengidentifikasi area perbaikan. Lebih dari sekadar memperhatikan perbedaan antara pria dan wanita, integrasi perspektif gender melibatkan pemahaman dan penanganan ketidaksetaraan yang mendasari serta upaya untuk mempromosikan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan (Nasional et al. 2024).

#### **4.2. Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**

Inisiatif penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan pembangunan inklusif di Indonesia adalah Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Berdasarkan informasi Kementerian Perempuan dan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, tujuan PPRG adalah memastikan kebijakan dan peraturan pemerintah menghormati hak dan kontribusi perempuan, apapun gendernya. Dengan cara ini (Nasional et al. 2024), PPRG membantu memastikan bahwa standar nasional bersifat adil dan tidak memihak, serta mengintegrasikan perspektif gender ke dalam inisiatif pembangunan nasional. Selain itu, PPRG aktif dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, khususnya SDG 5 yang mengatasi ketidaksetaraan gender.

Menurut laporan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, tujuan utama dari PPRG adalah memastikan bahwa kebijakan dan regulasi pemerintah memperhatikan dan menghormati hak serta kontribusi perempuan, tanpa memandang jenis kelamin (Nurhayati 2021). Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PPRG telah membawa dampak positif dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia (Kebijakan et al. 2024). Dengan memasukkan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran, PPRG berperan penting dalam menegaskan bahwa standar nasional yang ditetapkan bersifat adil dan tidak memihak, serta memastikan bahwa kebutuhan perempuan tercermin dalam inisiatif pembangunan nasional.

Sesuai dengan laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), memasukkan perspektif gender ke dalam perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan langkah penting dalam mengatasi kesetaraan gender dan pembangunan jangka panjang. Dengan mempertimbangkan perbedaan gender dalam pelaksanaan program dan tingkat anggaran, Indonesia dapat memenuhi SDGs dengan lebih efektif dan adil. PPRG juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan partisipasi setara antara perempuan dan laki-laki dalam proses Pembangunan (Noviani

2023). Menurut laporan UN Women, kebijakan dan program responsif gender membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi setiap individu.

PPRG juga terlibat dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, khususnya SDG 5 yang berfokus pada mengatasi ketidaksetaraan gender. Sesuai dengan laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), integrasi perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dianggap sebagai langkah yang krusial dalam mengatasi kesenjangan gender dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan perbedaan gender dalam implementasi program dan alokasi anggaran, PPRG memainkan peran penting dalam membantu Indonesia mencapai SDGs dengan lebih efektif dan adil. Lebih lanjut, PPRG juga bertindak sebagai alat untuk memastikan partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh proses pembangunan. Dengan menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan dan kontribusi dari kedua jenis kelamin, PPRG membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

#### **4.3. Kesetaraan Gender**

Kesetaraan gender merupakan tujuan utama agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang dilaksanakan oleh Bangsa-Bangsa Perserikatan Bangsa (PBB). Menurut laporan Indeks Kesetaraan Gender 2023 yang diterbitkan oleh Institut di Eropa untuk Kesetaraan Gender, perempuan terus menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi di banyak wilayah di dunia (Thousani and Afgani 2023). Dalam konteks Indonesia, Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan inisiatif penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Berdasarkan statistik Kementerian Perempuan dan Kesejahteraan Anak RI, tujuan PPRG adalah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengalaman hidup dan kesejahteraan anak, serta untuk memastikan kondisi yang adil dan masuk akal bagi perempuan dan anak perempuan.

Saat melaksanakan PPRG, penting untuk memahami perbedaan dan kebutuhan antar jenis kelamin secara holistic (Alamona, Zakarias, and Kawung 2017). Sebagaimana laporan UNDP mengenai konstruksi berkelanjutan di Indonesia, integrasi perspektif gender dalam program pembangunan mengikuti pemberian perlakuan yang sama, tetapi penanganan dan ketidaksetaraan yang mendasarinya. PPRG menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB tahun 2030, khususnya SDG nomor 5 yang membahas kesetaraan gender. Dengan melaksanakan PPRG secara efektif, Indonesia dapat memastikan bahwa pembangunan di masa depan dilakukan secara bijaksana dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kontribusi perempuan dan laki-laki, serta mempengaruhi keputusan-keputusan yang secara signifikan mempengaruhi norma-norma gender.

#### **4.4. Program Indonesia Emas Tahun 2045**

Program Indonesia Emas Tahun 2045 merupakan upaya generasi muda Tanah Air untuk mencapai kemajuan signifikan di berbagai bidang pembangunan. Berdasarkan data Bank Indonesia, visualisasi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik yang tinggi pada tahun 2045. Salah satu aspek krusial untuk mencapai Indonesia Emas adalah integrasi perspektif gender ke dalam seluruh program Pembangunan (Muda and Emas 2023), seperti Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, tujuan PPRG adalah untuk

*Pengintegrasian Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)*  
Aisyah Dewi, M. Arieliyanto, dan Muhammad Asif Nur Fauzi

memastikan kesempatan yang setara dan adil bagi perempuan dan anak perempuan, serta memasukkan perspektif gender ke dalam inisiatif pembangunan nasional. Dengan mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam strategi pembangunan gedung-gedung bertingkat seperti yang ada di Indonesia Emas, negara kita dapat mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berjangka panjang.

Integrasi perspektif gender dalam program Indonesia Emas Tahun 2045 mempunyai implikasi luas dalam mencapai kesetaraan gender dan paritas gender. Berdasarkan penelitian UN Women, mempertimbangkan perbedaan gender saat merancang sebuah bangunan dapat meningkatkan efektivitas program dan kebijakan serta membantu mengurangi stereotip gender. Melalui PPRG, Indonesia dapat memastikan bahwa kebutuhan dan kontribusi setiap orang—mulai dari laki-laki dan perempuan hingga anak-anak—dipertimbangkan dalam setiap langkah perjalanan negara menuju kemandirian ekonomi (Yusri 2020). Akibatnya, integrasi perspektif gender dalam membangun program seperti PPRG tidak hanya mengatasi hasil proyek yang serupa; sebaliknya, hal ini juga memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang norma gender, memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari proyek konstruksi yang sedang berlangsung.

#### **4.5. Program Pembangunan dan Kebutuhan Antar Gender**

Program Pembangunan dan Analisis Kebutuhan Berbasis Gender merupakan kajian yang berfokus pada perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki pada proses pembangunan. Sesuai laporan Bank Dunia tahun 2022, kesetaraan gender merupakan prasyarat untuk mencapai pembangunan inklusif dan jangka panjang dengan tetap menyeimbangkan kebutuhan dan kontribusi kedua belah pihak. PKAG bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya mempertimbangkan perbedaan gender tetapi juga memiliki kemampuan untuk mewakili perempuan dan anak perempuan secara adil dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari.

Berbagai metode, seperti penerapan Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dapat digunakan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam PKAG. Sesuai laporan Kementerian Perempuan dan Kesejahteraan Anak Indonesia, Kelompok Kependudukan dan Pembangunan (PPRG) merupakan strategi penting untuk memastikan perlakuan yang adil dan adil bagi perempuan dan anak perempuan, serta untuk memasukkan perspektif gender dalam inisiatif pembangunan nasional. Oleh karena itu, PPRG secara aktif berupaya memperkuat PKAG dengan memastikan bahwa kebutuhan dan kontribusi perempuan dihormati dalam semua program pembangunan di Indonesia.

#### **4.6 Program Pembangunan dan Kebutuhan Antar Gender**

Program Pembangunan dan Analisis Kebutuhan Berbasis Gender merupakan kajian yang berfokus pada perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki pada proses pembangunan (Yaneri and Deswanti 2021). Sesuai laporan Bank Dunia tahun 2022, kesetaraan gender merupakan prasyarat untuk mencapai pembangunan inklusif dan jangka panjang dengan tetap menyeimbangkan kebutuhan dan kontribusi kedua belah pihak (Zahro and Pramesti K.M 2023). PKAG bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya mempertimbangkan perbedaan gender tetapi juga memiliki kemampuan untuk mewakili perempuan dan anak perempuan secara adil dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari.

Berbagai metode, seperti penerapan Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dapat digunakan untuk mengintegrasikan perspektif gender

*Pengintegrasian Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)*  
*Aisyah Dewi, M. Arieliyanto, dan Muhammad Asif Nur Fauzi*

ke dalam PKAG. Sesuai laporan Kementerian Perempuan dan Kesejahteraan Anak Indonesia, Kelompok Kependudukan dan Pembangunan (PPRG) merupakan strategi penting untuk memastikan perlakuan yang adil dan adil bagi perempuan dan anak perempuan, serta untuk memasukkan perspektif gender dalam inisiatif pembangunan nasional. Oleh karena itu, PPRG secara aktif berupaya memperkuat PKAG dengan memastikan bahwa kebutuhan dan kontribusi perempuan dihormati dalam semua program pembangunan di Indonesia.

## 5. KESIMPULAN

Integrasi gender, khususnya melalui Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan inklusif di Indonesia. Dengan mempertimbangkan perbedaan gender saat menganalisis, merencanakan, dan melaksanakan kebijakan dan program, suatu negara dapat meningkatkan efisiensi konstruksi dan mengurangi kesenjangan gender. Integrasi perspektif gender dalam membangun program juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan PBB dalam mengatasi ketidaksetaraan gender (SDG 5). Pentingnya kesetaraan gender dalam mencapai target Jawa Timur tahun 2020 juga menyoroti perlunya mengadopsi prinsip-prinsip desain responsif gender di seluruh aspek bangunan. Mengingat hal ini, dorongan untuk mengintegrasikan perspektif gender, khususnya melalui PPRG, merupakan langkah penting menuju pencapaian pembangunan yang ambisius dan inklusif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Afdhal. 2023. "Peran Perempuan Dalam Perekonomian Lokal Melalui Ekowisata Di Maluku: Tinjauan Sosio-Ekologi Dan Sosio-Ekonomi." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 5(2):208–24. doi: 10.29303/resiprokal.v5i2.427.
- Afni, Nur, Mohammad Rezal, and Labandingi Latoki. 2022. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Musawa: Journal for Gender Studies* 14(1):19–48. doi: 10.24239/msw.v14i1.980.
- Agustina, Isna Fitria, Lailul Mursyidah, and Hendra Sukmana. 2021. "Gender Responsive Implementation in Village Government." 581(*Incesh*):199–202.
- Aisyah, Hesty, M. Dahniel Dahlan, and Mira Aprilia. 2023. "Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif Dari Indonesia." *Jurnal Economina* 2(12):3722–36. doi: 10.55681/economina.v2i12.1065.
- Alamona, Junaivan, John D. Zakarias, and Eveline J. R. Kawung. 2017. "MARGINALISASI GENDER DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN (Studi Kualitatif Kaum Perempuan Di Lembaga Legislatif Kota Manado)." *Holistik* X(20):1–19.
- Alif Hudzaifah Fahri, Muh, St Junaeda, and Fitrawati Nur. 2023. "Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Wanita Dengan Responsif Gender : Studi Kasus Kelurahan Pattingalloang." *JSI Jurnal Socia Logica* 3(2):3.
- Amsar. 2023. "Jurdar : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurdar : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat." *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(8):873–79.
- Arieta, Siti, Nikodemus Niko, Syarifah Ema Rahmaniah, Rupita Rupita, and Teguh *Pengintegrasian Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)* Aisyah Dewi, M. Arieliyanto, dan Muhammad Asif Nur Fauzi

- Setiandika Igiyasi. 2022. "Pembangunan Pariwisata Perbatasan (Border Tourism) Berbasis Pengarusutamaan Gender." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8(3):615–28. doi: 10.35326/pencerah.v8i3.2151.
- Fauzia Dwi Sasmita, Yulia Fernandita, Muhammad Azidan Noor, Rafa'na Rahman, and Wawan Prasetyo. 2023. "Korelasi Paparan Informasi Terkait Perguruan Tinggi Terhadap Minat Studi Lanjut Peserta Didik." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 18(2):171–82. doi: 10.47441/jkp.v18i2.339.
- Firman, Muhammad, Sobali Suswandy, Denda Ginanjar, Melita Amalia, and Ratu Kania. 2023. "Kesetaraan Gender Dan Perdamaian Global: Mendorong Partisipasi Perempuan Dalam Negosiasi Perdamaian." *Journal on Education* 05(04):17641–57.
- Hakiki, Gaib, Asnita Ulfah, Sugeng Supriyanto, Muhammad Basorudin, Widya Larasati, Dwi Prastiwi, Tanti KOSTAMAN, Nadira Irdiana, PUTRI Aanda, and SANTI KUSMANINGRUM. 2020. "Pencegahan Perkawinan Anak Ucapan Terima Kasih." *Unicef* 1–3.
- Ilmu, Fakultas, Sosial Dan, Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam, and Negeri Ar-raniry Banda. 2021. "ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER ( Studi Implementasi Perwal Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah )."
- Kebijakan, Studi, Perempuan Dan, Perlindungan Anak, and Di Kota. 2024. "JURNAL BARATA INDONESIA ( JBI )." 1:45–65.
- Maximus Gorky Sembiring. 2022. "Kaji Ulang Determinan Penyiapan Moocs Berkualitas Mengembangkan Kompetensi Inovasi Menuju Indonesia 4.0." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka* 1:35–52. doi: 10.33830/prosidingsemaster.v1i1.89.
- Milasari, Devi. 2024. "MEWUJUDKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DAN BERKUALITAS DALAM." 1(3):119–25.
- Muda, Generasi, and Generasi Emas. 2023. "Vol . 11 No . 1 , Desember 2023 PEMBANGUNAN KARAKTER GENERASI MUDA BEBAS KEKERASAN MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA 2045 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL Ahmad Nur Ahsan Teknik Elektronika Pertahanan , AkademiMiliter Muchammad Hifni Teknik Elekt." 11(1).
- Nasional, Pembangunan, May May Maysarah, Sjafrie Sjamsoeddin, Eko G. Samudro, and Bambang Wahyudi. 2024. "Akselerasi Agenda Women , Peace , and Security ( WPS ) Dalam." 1(1):1–10.
- Noviani, Ita. 2023. "Analisis Hambatan Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa."
- Nurhayati, Pebri. 2021. "Kesetaraan Gender Dalam Organisasi Mahasiswa Dema Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2021." 1–254.
- Pradnya, I. Made. 2020. "Perencanaan Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Berperspektif Gender Pada Pemerintah Daerah." *Public Management and Accounting Review* 1(1):45–58. doi: 10.61656/pmar.v1i1.37.
- Puspa, Celyna Isnaeni Septia, Dini Nur Oktavia Rahayu, and Muhamad Parhan. 2023. "Transformasi Pendidikan Abad 21 Dalam Merealisasikan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Emas 2045." *Jurnal Basicedu* 7(5):3309–21. doi: 10.31004/basicedu.v7i5.5030.
- Ramadhani, Fadhilla Putri, and Aida Vitayala S. Hubeis. 2020. "Analisis Gender Dalam Upaya Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 4(2):155–66. doi: 10.29244/jskpm.4.2.155-166.

*Pengintegrasian Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)*  
Aisyah Dewi, M. Arieliyanto, dan Muhammad Asif Nur Fauzi

- Ramdlaningrum, Herni, Dwi Rahayu Ningrum, Ricko Nurmansyah, Ah Maftuchan, and Victoria Fanggidae. 2022. "Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia Dan Aspek Gender Dalam Kerangka Pinjaman Dan Investasi."
- Thousani, Hifzhan Frima, and Kurnia Fajar Afgani. 2023. "Jaringan Dalam Mendorong Perempuan Untuk Memulai Dan Mempertahankan Bisnis: Tinjauan Literatur Sistematis." *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 9(2):100–132. doi: 10.35313/jrbi.v9i2.5704.
- Vininda, Sutri, and Lia Yuliana. 2021. "Penerapan Regresi Data Panel Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Riau Periode 2011-2015." *Seminar Nasional Official Statistics* 2020(1):549–59. doi: 10.34123/semnasoffstat.v2020i1.416.
- Yaneri, Ahmad, and Arini Dwi Deswanti. 2021. "Analisis Kesetaraan Gender Dan Inklusi Sosial Pada Program Perlindungan Sosial : Studi Kasus Bantuan Sosial Tunai Covid-19 Di Kabupaten Bandung Barat." *Pekerjaan Sosial* 20(1):70–84. doi: 10.31595/peksos.v20i1.381.
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. 2020. "濟無No Title No Title No Title." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7(2):809–20.
- Zahro, Fatimatuz, and Shinta Pramesti K.M. 2023. "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7(1):25–46. doi: 10.30762/mahakim.v7i1.201.